

## Pandangan Filsafat Postmodernisme Terkait Kerusakan Alam Yang Berakibat Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera

Aldyans Rio Pratra

Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding author's e-mail: [pratraaldyansrio@gmail.com](mailto:pratraaldyansrio@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 07-06-2026

Diterima, 10-07-2026

Dipublikasi, 16-07-2026

### Kata Kunci:

Postmodernisme;  
Krisis Ekologi; Banjir;  
Tanah Longsor;  
Sumatera

### Keywords:

Postmodernism;  
Ecological Crisis;  
Floods; Landslides;  
Sumatra

### Abstrak

Kerusakan lingkungan yang memicu banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera mencerminkan kegagalan paradigma pembangunan modern yang bersifat antroposentris dan eksploitatif. Artikel ini bertujuan menganalisis krisis ekologi di Sumatera melalui perspektif filsafat postmodernisme sebagai pendekatan kritis terhadap narasi pembangunan dominan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis-kritis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa postmodernisme, melalui kritik terhadap metanarasi modernitas, relasi kuasa, dan rasionalitas instrumental, mampu mengungkap bahwa bencana ekologis bukan semata-mata fenomena alam, melainkan produk konstruksi sosial, politik, dan diskursif yang dilegitimasi oleh praktik pembangunan. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya dekonstruksi paradigma pembangunan modern serta integrasi etika lingkungan postmodern dan kearifan lokal sebagai dasar perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### Abstract

*Environmental degradation leading to recurrent floods and landslides on the island of Sumatra reflects the failure of the modern development paradigm, which is anthropocentric and exploitative in nature. This article aims to analyze the ecological crisis in Sumatra through the lens of postmodern philosophy as a critical approach to dominant development narratives. The study employs a qualitative method with a philosophical-critical approach, utilizing a literature review. The findings reveal that postmodernism, through its critique of modern metanarratives, power relations, and instrumental rationality, demonstrates that ecological disasters are not merely natural phenomena but socio-political and discursive constructions legitimized by development practices. Therefore, this article emphasizes the necessity of deconstructing the modern development paradigm and integrating postmodern environmental ethics and local wisdom as foundations for equitable and sustainable environmental governance.*

## PENDAHULUAN

Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang memiliki kekayaan ekologis signifikan, baik berupa hutan hujan tropis, kawasan pegunungan, maupun daerah aliran sungai yang luas. Keberadaan sumber daya alam tersebut seharusnya menjadi basis pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pembangunan di Sumatera justru menunjukkan kecenderungan eksploitatif yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Fenomena banjir dan tanah longsor yang berulang hampir setiap tahun di berbagai wilayah Sumatera menjadi indikator krisis ekologis yang bersifat struktural dan sistemik.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> A. Suryadi, *Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 18 No. 2, 2022, hlm. 203.

Fenomena banjir dan tanah longsor sering kali dipahami secara sempit sebagai peristiwa alamiah yang disebabkan oleh faktor curah hujan tinggi atau kondisi geografis tertentu. Pendekatan semacam ini mencerminkan dominasi paradigma teknokratis dalam pengelolaan lingkungan, yang cenderung memisahkan bencana dari konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melahirkannya.<sup>2</sup> Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia, termasuk di Sumatera, merupakan hasil dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Paradigma pembangunan modern yang dominan berakar pada rasionalitas instrumental dan pandangan antroposentris, yaitu cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dan alam semata-mata sebagai objek eksploitasi. Alam direduksi menjadi komoditas ekonomi yang nilainya ditentukan oleh manfaat materialnya bagi manusia.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, hutan dipahami sebagai sumber kayu, lahan sebagai ruang produksi, dan sungai sebagai sarana pendukung aktivitas ekonomi. Konsekuensinya, keberlanjutan ekologis dan keadilan lingkungan sering kali terpinggirkan oleh kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Pendekatan teknokratis yang dominan dalam kebijakan lingkungan terbukti tidak mampu menjawab akar permasalahan krisis ekologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan filosofis yang lebih reflektif dan kritis. Filsafat postmodernisme menawarkan kerangka analisis yang relevan karena secara fundamental mengkritik klaim kemajuan universal, rasionalitas instrumental, dan dominasi diskursus pembangunan modern.<sup>5</sup>

Dalam konteks inilah, filsafat postmodernisme menjadi relevan sebagai kerangka analisis kritis. Postmodernisme menawarkan pembacaan alternatif terhadap realitas sosial dan lingkungan dengan menolak klaim kebenaran tunggal serta mengkritik dominasi rasionalitas instrumental. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara manusia, alam, dan kekuasaan dalam praktik pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis-kritis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna, asumsi, dan ideologi yang melandasi paradigma pembangunan modern serta dampaknya terhadap lingkungan hidup di Sumatera. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah delapan jurnal internasional dan sepuluh jurnal nasional yang relevan dengan tema postmodernisme, krisis ekologi, dan pembangunan.

Analisis data dilakukan secara interpretatif dengan menempatkan teks-teks filosofis dan kajian lingkungan dalam dialog kritis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap relasi antara diskursus pembangunan, kekuasaan, dan praktik eksploitasi lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat normatif-filosofis dan tidak bertujuan menghasilkan generalisasi empiris, melainkan pemahaman kritis dan reflektif.

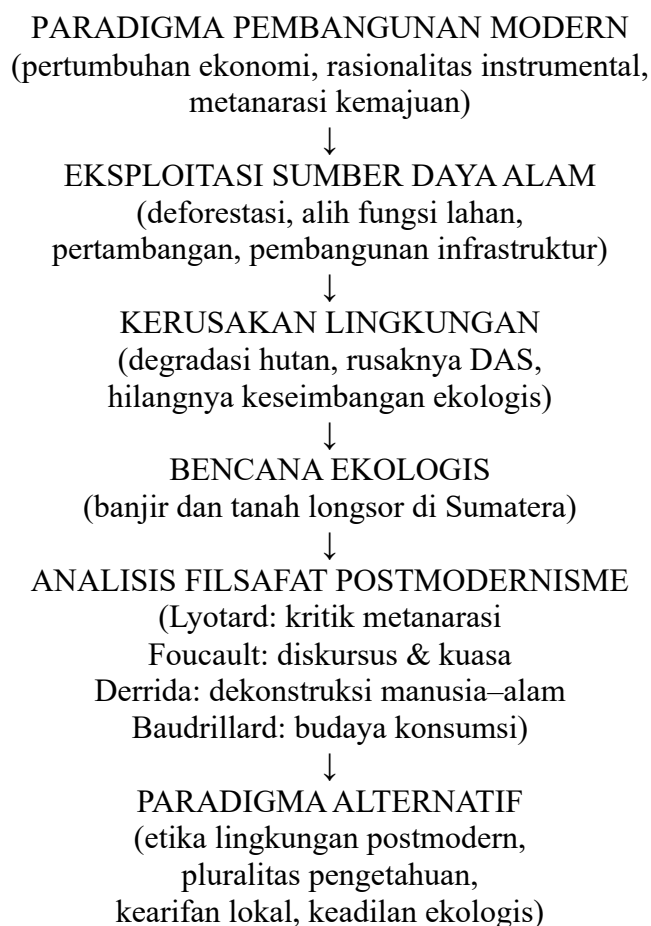
Bagan kerangka pemikiran berikut menggambarkan alur logis penelitian dalam memahami hubungan antara paradigma pembangunan modern, kerusakan lingkungan, dan bencana banjir serta tanah longsor di Sumatera melalui perspektif filsafat postmodernisme.

<sup>2</sup> Dryzek, *The Politics of the Earth: Environmental Discourses*, Oxford: Oxford University Press, 2013, hlm. 15.

<sup>3</sup> A. Suryadi, *Op.Cit.*, hlm. 203

<sup>4</sup> Gare, *Postmodernism and the Environmental Crisis*, London: Routledge, 1995, hlm. 42.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 12.



**Bagan 1.** Kerangka Pemikiran Penelitian

Bagan ini menunjukkan bahwa bencana banjir dan tanah longsor dipahami sebagai konsekuensi dari konstruksi sosial dan paradigma pembangunan tertentu, serta menegaskan peran filsafat postmodernisme sebagai alat analisis kritis untuk merumuskan pendekatan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian mengungkap peran budaya konsumsi global sebagaimana dikemukakan Jean Baudrillard dalam mempercepat eksploitasi sumber daya alam.<sup>6</sup> Dorongan terhadap produksi dan konsumsi berlebihan menciptakan tekanan ekologis yang semakin besar, terutama di wilayah yang kaya sumber daya seperti Sumatera. Pembangunan tidak lagi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melainkan pada pemuasan kebutuhan semu yang memperparah degradasi lingkungan.

Selain dampak ekologis, penelitian ini menemukan bahwa krisis lingkungan di Sumatera memiliki implikasi sosial yang serius. Banjir dan tanah longsor menyebabkan hilangnya mata pencaharian, kerusakan infrastruktur, konflik agraria, serta meningkatnya kerentanan kelompok masyarakat marginal. Hal ini menegaskan bahwa krisis ekologis juga merupakan krisis keadilan sosial dan keadilan ekologis.

Terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat postmodernisme membuka ruang bagi paradigma alternatif dalam pengelolaan lingkungan. Etika lingkungan postmodern menekankan pluralitas pengetahuan, dialog antar nilai, serta integrasi kearifan lokal sebagai

<sup>6</sup> Jean Baudrillard, *Op. Cit.*, hlm. 29–31.

dasar kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks Sumatera, pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dan lahan terbukti memiliki potensi untuk mengurangi risiko bencana serta membangun relasi yang lebih harmonis antara manusia dan alam.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penanggulangan banjir dan tanah longsor di Sumatera tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis dan struktural semata, melainkan memerlukan perubahan paradigma pembangunan secara fundamental dengan landasan etika lingkungan dan keadilan ekologis.

### **Landasan Teoretis: Filsafat Postmodernisme dan Krisis Lingkungan**

Postmodernisme lahir sebagai kritik terhadap kegagalan proyek modernitas yang menjanjikan kemajuan dan kesejahteraan universal. Jean-François Lyotard menyebut kondisi ini sebagai ketidakpercayaan terhadap metanarasi, yaitu narasi besar yang mengklaim kebenaran tunggal.<sup>7</sup> Dalam konteks lingkungan, metanarasi pembangunan sering digunakan untuk melegitimasi eksploitasi alam atas nama pertumbuhan ekonomi.

Michel Foucault menegaskan bahwa pengetahuan tidak pernah netral, melainkan selalu terkait dengan relasi kuasa. Diskursus pembangunan dan lingkungan membentuk cara negara dan aktor ekonomi memahami alam, sekaligus menentukan kebijakan yang diambil. Pengetahuan teknokratis sering kali diposisikan sebagai kebenaran objektif, sementara pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat adat dikesampingkan.<sup>8</sup>

Jacques Derrida melalui konsep dekonstruksi mengkritik dikotomi biner yang menjadi dasar pemikiran modern, seperti manusia–alam, subjek–objek, dan rasional–irasional. Dikotomi ini menempatkan manusia sebagai pusat (antroposentris) dan alam sebagai entitas pasif yang dapat dieksploitasi. Postmodernisme berupaya membongkar struktur pemikiran tersebut untuk membuka kemungkinan relasi yang lebih etis dan dialogis antara manusia dan alam.<sup>9</sup>

Pandangan ini diperkuat oleh temuan jurnal nasional yang menyatakan bahwa orientasi pembangunan berbasis pertumbuhan telah mengabaikan daya dukung lingkungan dan prinsip kehati-hatian<sup>6</sup>. Dengan demikian, postmodernisme relevan untuk membongkar asumsi dasar pembangunan modern yang menempatkan alam semata sebagai objek ekonomi.<sup>10</sup>

### **Kerusakan Lingkungan di Sumatera sebagai Krisis Struktural**

Deforestasi, alih fungsi lahan, dan pertambangan terbuka di Sumatera menunjukkan dominasi rasionalitas instrumental dalam kebijakan pembangunan. Alam direduksi menjadi komoditas ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis. Dampaknya adalah rusaknya daerah aliran sungai, meningkatnya limpasan air permukaan, serta instabilitas tanah di kawasan perbukitan.<sup>11</sup>

Dalam kebijakan lingkungan di Indonesia, diskursus teknokratis sering kali diposisikan sebagai satu-satunya kebenaran ilmiah, sementara suara masyarakat lokal tidak memperoleh ruang yang setara. Penelitian hukum lingkungan nasional menunjukkan bahwa proses perizinan tambang dan perkebunan kerap mengabaikan partisipasi publik yang bermakna.<sup>12</sup>

Dari perspektif postmodernisme, kondisi ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan epistemologis dan ideologis. Banjir dan tanah longsor merupakan bentuk resistensi ekologis terhadap dominasi manusia atas alam.<sup>13</sup>

<sup>7</sup> J.-F. Lyotard, *The Postmodern Condition*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984, hlm. xxiv.

<sup>8</sup> M. Foucault, *Power/Knowledge*, New York: Pantheon Books, 1980, hlm. 131.

<sup>9</sup> J. Derrida, *Of Grammatology*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976, hlm. 44.

<sup>10</sup> Nugroho, H., "Paradigma Pembangunan dan Krisis Ekologi," *Jurnal Pembangunan Wilayah* 14, no. 1 (2019): 55–70.

<sup>11</sup> D. Wahyuni, "Deforestasi dan Dampaknya terhadap Banjir di Sumatera", *Jurnal Geografi Lingkungan*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 36.

<sup>12</sup> Rahmawati, L., "Partisipasi Publik dalam Kebijakan Lingkungan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 321–338.

<sup>13</sup> J. Dryzek, *Op. Cit.*, 2013, hlm. 89.

Krisis ekologis ini juga mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Masyarakat sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, sementara keuntungan ekonomi dinikmati oleh segelintir aktor. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan di Sumatera merupakan bagian dari krisis keadilan ekologis.

### Analisis Postmodernisme terhadap Paradigma Pembangunan

Lyotard mengkritik narasi pembangunan yang mengklaim kemajuan sebagai tujuan universal. Di Sumatera, narasi ini diwujudkan melalui kebijakan negara dan investasi korporasi yang mengabaikan keberlanjutan ekologis. Postmodernisme membongkar asumsi bahwa pembangunan selalu identik dengan kesejahteraan.<sup>14</sup>

Foucault membantu mengungkap bagaimana relasi kuasa bekerja dalam penguasaan ruang hidup masyarakat lokal. Pengetahuan teknokratis sering kali menyingkirkan kearifan lokal yang justru lebih adaptif terhadap kondisi ekologis.<sup>15</sup> Sementara itu, Baudrillard menunjukkan bahwa budaya konsumsi global mempercepat eksploitasi alam melalui kebutuhan semu.<sup>16</sup>

Dengan demikian, postmodernisme tidak hanya berfungsi sebagai kritik teoretis, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami dinamika kekuasaan dan ideologi dalam praktik pembangunan di Sumatera.

### Etika Lingkungan Postmodern dan Kearifan Lokal

Postmodernisme menolak etika lingkungan yang bersifat tunggal dan universal. Etika lingkungan postmodern menekankan pluralitas nilai, dialog antarpengertian, serta pengakuan terhadap kearifan lokal.<sup>17</sup> Dalam konteks Sumatera, kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dan lahan memiliki potensi besar untuk mengurangi risiko bencana.

Integrasi pengetahuan lokal ke dalam kebijakan lingkungan bukan sekadar romantisasi tradisi, melainkan strategi epistemologis untuk membangun paradigma pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.<sup>18</sup>

### Dampak Sosial dan Kemanusiaan

Bencana banjir dan tanah longsor berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat, seperti hilangnya mata pencaharian, kerusakan infrastruktur, dan meningkatnya kerentanan kelompok marginal. Postmodernisme menyoroti pentingnya mendengarkan narasi korban sebagai bentuk resistensi terhadap narasi pembangunan yang hegemonik.

**Tabel 1.** Faktor Kerusakan Lingkungan dan Dampaknya di Sumatera

No	Faktor Kerusakan Lingkungan	Bentuk Aktivitas	Dampak Ekologis	Dampak Sosial
1	Deforestasi	Pembukaan hutan untuk perkebunan dan industri	Hilangnya tutupan hutan, berkurangnya resapan air	Banjir, hilangnya mata pencaharian
2	Alih fungsi lahan	Perubahan lahan hutan menjadi permukiman	Ketidakeimbangan ekosistem	Tanah longsor, kerusakan infrastruktur
3	Pertambangan	Eksplorasi tambang terbuka	Kerusakan struktur tanah dan DAS	Konflik sosial, bencana ekologis
4	Pembangunan infrastruktur	Jalan, bendungan, kawasan industri	Fragmentasi habitat	Kerentanan masyarakat lokal

<sup>14</sup> Lyotard, *The Postmodern Condition*, hlm. 60

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> J. Baudrillard, *The Consumer Society*, London: Sage, 1998, hlm. 31

<sup>17</sup> J. Cheney, "Postmodern Environmental Ethics", *Environmental Ethics*, Vol. 11 No. 2, 1989, hlm. 119.

<sup>18</sup> T. Yuliana, "Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 43 No. 2, 2022, hlm. 170.

Table di atas menggambarkan keterkaitan antara aktivitas manusia, bentuk kerusakan lingkungan, serta dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya di wilayah Sumatera. Deforestasi dan alih fungsi lahan menunjukkan bagaimana hilangnya tutupan hutan secara langsung memengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap air, sehingga meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Aktivitas pertambangan dan pembangunan infrastruktur memperparah kondisi tersebut dengan merusak struktur tanah, daerah aliran sungai, serta fragmentasi habitat alami.

Dari perspektif filsafat postmodernisme, data dalam tabel ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak berdiri sebagai fenomena alamiah semata, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi. Tabel ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa bencana ekologis di Sumatera merupakan konsekuensi logis dari paradigma pembangunan modern yang mengabaikan keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

## KESIMPULAN

Krisis ekologi yang berujung pada banjir dan tanah longsor di Sumatera merupakan konsekuensi dari paradigma pembangunan modern yang eksploitatif dan antroposentris. Filsafat postmodernisme memberikan kerangka kritis untuk memahami bencana ekologis sebagai konstruksi sosial, politik, dan ideologis. Oleh karena itu, penanggulangan bencana memerlukan perubahan paradigma pembangunan dengan menempatkan etika lingkungan, pluralitas pengetahuan, dan kearifan lokal sebagai landasan utama kebijakan.

Filsafat postmodernisme memberikan kerangka kritis untuk memahami bencana ekologis sebagai konstruksi sosial, politik, dan diskursif. Melalui kritik terhadap metanarasi pembangunan, rasionalitas instrumental, dan dominasi pengetahuan teknokratis, postmodernisme membuka ruang bagi paradigma alternatif yang lebih etis dan plural. Integrasi etika lingkungan postmodern dan kearifan lokal menjadi langkah strategis untuk membangun kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan ekologis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penanggulangan krisis ekologi di Sumatera tidak cukup dilakukan melalui kebijakan teknis semata, melainkan memerlukan perubahan paradigma pembangunan secara fundamental. Perubahan ini menuntut keberanian untuk mendekonstruksi narasi pembangunan modern dan mengakui keberagaman pengetahuan sebagai dasar pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan antar generasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baudrillard, J. (1998). *The Consumer Society*. London: Sage Publications.
- Cheney, J. (1989). Postmodern environmental ethics. *Environmental Ethics*, 11(2), 117–134.
- Derrida, J. (1976). *Of Grammatology*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Dryzek, J. (2013). *The Politics of the Earth: Environmental Discourses*. Oxford: Oxford University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Gare, A. E. (1995). *Postmodernism and the Environmental Crisis*. London: Routledge.
- Lytard, J.-F. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Nugroho, H. (2019). Paradigma pembangunan dan krisis ekologi. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 14(1), 55–70.
- Prasetyo, E. (2020).
- Rahmawati, L. (2020). Partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 321–338.

- Suryadi, A. (2022). Kerusakan lingkungan dan bencana alam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(2), 201–215.
- Wahyuni, D. (2021). Deforestasi dan dampaknya terhadap banjir di Sumatera. *Jurnal Geografi Lingkungan*, 9(1), 29–42.
- Yuliana, T. (2022). Kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(2), 160–175.